

ABSTRAK

Imran, Andi Paturusi. 11210096. 2015. *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang [Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)]* Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah M.Ag

Kata Kunci: Sistem, Informasi, Perkawinan, Pemeriksaan, Pengawasan,

Sebelum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, masih menggunakan sistem manual. Sistem manual ini yang masih digunakan di sebagian KUA yang ada di Indonesia, sistem ini berpotensi pada terjadinya pelanggaran administrasi antara lain : pemalsuan identitas nikah, poligami ilegal dan lain- lain. SIMKAH yang diterapkan di KUA Klojen Kota Malang dan KUA lainnya ini, diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan sama sekali kesalahan disengaja maupun yang tidak disengaja tentang administrasi pencatatan perkawinan, sehingga dengan sistem ini akan menangani masalah-malalah perkawinan yang ada saat ini.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, dan biaya. dan juga adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ketahun, proses pemeriksaan sebelum dan sesudah SIMKAH cenderung sama hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan, sebelum adanya SIMKAH dapat dikatakan kurang akurat, memakan waktu yang lama, membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan terhadap data pernikahan, data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi, setelah adanya SIMKAH proses pencatatan lebih cepat, akurat, relevan, semua kinerja membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA, dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya, adanya kerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Kantor Imigrasi, maka nantinya sebuah pengawasan perkawinan akan terwujud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas, poligami ilegal dan lain-lain karena antar instansi saling terintegrasi sehingga, penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan.